
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KABUPATEN KLATEN

Oleh

Tyta Nandung Ayu Rosanti¹, Eko Triyanto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

Email: ¹tytanandung2@gmail.com, ²triyantoeko376@gmail.com

Article History:

Received: 24-07-2023

Revised: 03-08-2023

Accepted: 26-08-2023

Keywords:

Performance, Ratio, Effectiveness, Efficiency, Independence, Harmony, Growth

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the financial performance of the local government of Klaten Regency by using an analysis of effectiveness ratios, efficiency ratios, independence ratios, compatibility ratios, and growth ratios. This type of research is a qualitative descriptive research. The data used in this study is secondary data, namely the Realization Report of the Klaten Regency Regional Revenue Budget from 2017 to 2021 which was obtained using documentation techniques. The method used in the data is financial ratio analysis. The results of this study indicate that the financial performance of the Klaten Regency government is still not optimal, even though the management of Local Own Revenue (PAD) is very effective and efficient. On the other hand, the level of regional financial independence is also still low, this can be proven from the amount of assistance from the central government compared to the regional original income of Klaten Regency. In addition, the use of funds is still not balanced because most of the funds are used for operating expenditures rather than capital expenditures*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pada saat ini akuntansi sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta memperhatikan value for money. Value for money adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya alam, artinya bahwa penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing cost), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai anggaran sesuai tujuan dan sasaran.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan topik yang sangat penting untuk dibahas, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu di kaji lebih lanjut. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian yang lemah, dan staff akuntan yang tidak memadai, yang berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dona & Lestari, 2020) menunjukkan tingkat efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Amanda, 2021) menurut Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung di tahun 2017-2020 masih tergolong kurang efektif. Pada penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nurhaliza, 2022) menunjukan hasil penelitian kinerja keuangan pada Kantor Sekretariat DPRD PROVSU Tahun 2017-2021 dilihat dari Analisis Efektivitas PAD menurun karena belum mampu memanfaatkan anggaran yang direncanakan dengan baik, dari Analisis Efisiensi menunjukkan realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (A. R. Putri & Kabib, 2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif. Disisi lain tingkat kemandirian keuangan daerah juga masih rendah.

Banyaknya penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa pentingnya pengukuran Kinerja Keuangan. Menurut (Jumingan, 2006) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah pada periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran merupakan bagian penting dari laporan keuangan pemerintah. Tercapainya realisasi dalam anggaran lembaga adalah hal yang penting diketahui masyarakat saat ini. Karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya (Majampoh, 2021).

Penelitian ini mereplika dari peneliti (Walandouw et al., 2015), adapun pembedanya adalah penambahan perhitungan rasio penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian yang

dilakukan (Walandouw et al., 2015) menggunakan perhitungan rasio efektif dan rasio efisien saja dan mengambil objek pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. Sedangkan penelitian ini menggunakan 5 rasio perhitungan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan mengambil objek Kantor Kabupaten Klaten. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan berbagai rasio keuangan dengan perhitungan yang diharapkan dapat memberikan hasil dan informasi yang maksimal mungkin mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2017-2021.

Kabupaten Klaten adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini ditunjukkan membengkaknya anggaran untuk pegawai. Pada tahun 2011 anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Klaten mencapai 70% dari total belanja tahun 2011 (sumber: www.solopos.com). Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Klaten. Ditambah lagi Kabupaten Klaten masih menggunakan incremental budget dalam penyusunan APBD, sementara itu cara seperti ini sudah sedikit ketinggalan zaman dan mungkin tidak relevan lagi dilakukan. Pada penelitian ini hanya mengambil laporan realisasi anggaran saja dengan alasan, laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Jika dibandingkan dengan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting. LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional, serta laporan arus kas (Majampoh, 2021)

Dapat disimpulkan pada uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kabupaten Klaten.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada *stewardship theory*, sebuah cabang dari teori keagenan, yang menjelaskan bahwa manajemen tidak didorong oleh kepentingan pribadi melainkan berfokus pada kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Hersa, 2018). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik karena akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. *Principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi- fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaab menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/ principals*) mempercayakan (*trust = amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward = manajemen*) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan (*amanah = trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Kesimpulan dari stewardship theory bila dikaitkan dengan judul yaitu Badan Pengeloalan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten harus mematuhi dan memahami laporan APBD yang ditentukan oleh pemerintah, dan seharusnya mereka membuat laporan APBD sesuai dengan amanah tersebut supaya laporan APBD yang mereka hasilkan dalam keadaan laporan APBD yang berkualitas.

Teori

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Suryanto, 2019) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Basis penerapan standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Berbasis kas

Basis kas (cash basis) yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/ daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan (M. V. Putri et al., 2021)

2. Berbasis akrual

Basis akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ APBD. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut (Dwi Destri Arnianto, 2020) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh

pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan

Dalam hal bendahara umum negara/bendahara daerah atau instansi pemerintah lainnya menerima dana yang melebihi kebutuhan yang dianggarkan untuk tahun anggaran yang berlaku, kelebihan tersebut menjadi milik pemerintah yang sah dan tidak dapat dikembalikan.

2. Belanja

Segala pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara negara atau bendahara umum daerah dalam tahun anggaran yang berlaku yang tidak dapat diperoleh kembali dianggap sebagai pengeluaran.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus/ defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran

Selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD dengan jumlah yang dianggarkan merupakan sisa lebih/kurang dari pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Definisi Anggaran

Menurut (Mahsun, 2013) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran biasanya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal.

Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap aktivitas untuk melihat sudah sejauh mana tingkat keberhasilan suatu entitas dalam melaksanakan pekerjaannya dan menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tingkat kinerja keuangan dapat diukur oleh pemerintah dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah (Amanda, 2021).

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam mengukur tingkat kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya maka digunakan analisis rasio keuangan (Halim, 2013). Jenis rasio keuangan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Seperti yang ditunjukkan oleh (Halim, 2013), rasio efektivitas merupakan representasi dari tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi rencana pengeluaran pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini berisi perbandingan antara realisasi PAD dan anggarannya. Kemampuan daerah bisa dikatakan efektif, apabila rasio efektifitas bernilai sebesar minimal 100%. Berikut adalah tabel kriteria rasio efektivitas keuangan daerah:

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 dalam (Siregar & Mariana, 2020)

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional yang dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Menurut (Mardiasmo, 2009) Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya, administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan standar efisiensi keuangan daerah:

Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 dalam (Siregar & Mariana, 2020)

3. Rasio Kemandirian

Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif dan penuh inisiatif mampu mempengaruhi rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan usahanya.

Dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat dilihat seberapa efektif suatu pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahnya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, semakin besar tingkat kemandiriannya. Rasio kemandirian juga menjelaskan sejauh mana kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Tingginya rasio kemandirian menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah. Berikut adalah tingkatan kriteria dalam rasio kemandirian:

Tabel 3. Kriteria Rasio Kemandirian

Presentasi Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 dalam (Siregar & Mariana, 2020)

4. Rasio Kecerahan

Menurut (Fathah, 2017) Rasio Kecerahan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kecerahan ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut (Sartika, 2019) Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun bersangkutan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilannya yang sudah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi- potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.



Gambar 1 : Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan menginterpretasikan dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh data yang tersaji, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut (Sugiyono, 2009) Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten 2017-2021.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan berasal dari data sekunder yang diambil dengan teknik dokumentasi. Data yang didapat berupa satu dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten yang menggunakan studi time series, yaitu datanya ada pada rentetan waktu tertentu. Periode laporan yang dipakai dalam pengambilan data dari Laporan Realisasi Anggaran ini adalah tahun 2017 sampai dengan 2021.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Rumus untuk menghitung tingkat rasio adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektifitas

Rasio ini diukur dengan membandingkan kinerja dan anggaran PAD. Kemudian, tingkat rasio pendapatan dikelompokkan menurut standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 pada tahun 1996. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Dalam menghitung rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah digunakan perbandingan antara total biaya perolehan beban dan pendapatan. Hasil perhitungan ini kemudian di klasifikasikan menurut standar yang ditetapkan oleh

Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 pada tahun 1996. Rumus untuk indeks efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan transfer yang diterima. Kemudian, tingkat rasio pendapatan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan dan pola hubungan. Perhitungan rasio kemandirian diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Tingkat keserasian menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Perhitungan rasio ini dibagi menjadi dua perhitungan, yaitu rasio biaya operasional dan rasio biaya modal. Rumus untuk menghitung rasio keserasian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan menggambarkan realisasi pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Cara mengukur tingkat pertumbuhan adalah dengan membandingkan selisih antara pendapatan periode tertentu dengan periode sebelumnya. Rasio tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } n - \text{Pendapatan Tahun } (n - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Menurut (Budianto, 2021) Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2. Tingkat efektivitas penerimaan PAD tahun anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Kriteria
2017	371.718.439.306,04	335.512.441.000	110	Sangat efektif
2018	395.884.244.135,42	373.770.433.500	105	Sangat efektif
2019	311.648.401.655,44	292.651.477.481	106	Sangat efektif
2020	329.963.261.898	246.558.797.299	133	Sangat efektif
2021	160.129.697.279	134.613.386.000	118	Sangat efektif
Rata- Rata			115	Sangat efektif

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2017-2021, tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Kabupaten Klaten memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah paling efektif yakni sebesar 133% sesuai dengan yang ditargetkan dengan rasio efektifitas diatas 100%. Adapun perhitungan efektivitas anggaran berdasarkan angka- angka pada laporan realisasi anggaran tahun 2017-2021 di Kabupaten Klaten dengan hasil perhitungan dari rasio dapat diketahui bahwa efektifitas realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 adalah 110%, tahun 2018 adalah 105%, tahun 2019 adalah 106%, tahun 2020 adalah 133%, dan pada tahun 2021 adalah 118%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah Efektif karena rata- rata efektivitasnya diatas 100% yaitu 115%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Klaten juga dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk mempertahankan hal tersebut, Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 3. Tingkat efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	1.846.458.264.255,22	2.581.515.295.917,04	71	Efisien
2018	1.906.017.589.489,88	2.577.961.130.135,42	73	Efisien
2019	1.917.895.032.426,68	2.689.353.252.985,44	71	Efisien
2020	1.820.342.899.284,00	2.578.135.836.354,00	70	Efisien
2021	718.312.446.222,00	134.613.386.000,00	31	Sangat Efisien
Rata- rata			63	Efisien

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten Klaten dari 2017-2021 tergolong efisien. Adapun perhitungan efisiensi keuangan di Kabupaten Klaten dengan hasil perhitungan dari rasio ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 adalah 71% , tahun 2018 adalah 73%, tahun 2019 adalah 71%, tahun 2020 adalah 70%, dan pada tahun 2021 adalah 31%.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dikatakan efisien karena rata- rata rasionya sebesar 63%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten Klaten bisa mengatur jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik.

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 4. Tingkat rasio kemandirian penerimaan PAD tahun anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2017	371.718.439.306,04	1.897.766.670.520	19	Sangat Rendah	Instruktif
2018	395.884.244.135,42	1.838.239.391.888	21	Sangat Rendah	Instruktif
2019	311.648.401.655,44	1.886.745.999.817	16	Sangat Rendah	Instruktif
2020	329.963.261.898	1.752.155.233.956	18	Sangat Rendah	Instruktif
2021	160.129.697.279	2.130.432.992.470	7.5	Sangat Rendah	Instruktif
Rata- rata			16,7%	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Tabel46 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian penerimaan PAD pada Kabupaten Klaten masih sangat rendah dari tahun ke tahun. Berawal pada tahun 2017 sebesar 19%, kemudian tahun 2018 sebesar 21% dan turun menjadi 16% di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 naik lagi menjadi 18% dan di tahun 2021 turun menjadi 7,5%.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Pendekatan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori sangat rendah. Dengan rata-rata sebesar 16,7% dari tahun 2017- 2021, berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola instruktif. Menurut (Dwirandra, 2006) Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih berpegang teguh terhadap sumber dana ekstern yang masih sangat tinggi. Dimana pemerintah Daerah belum bisa memaksimalkan PAD dalam mengeluarkan biaya pada pembangunan daerahnya. Dalam hal ini diperlukan partisipasi

masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi yang juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Klaten sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mengatur dan memaksimalkan penerimaan dari segi pendapatannya yang telah ada. Upaya untuk meningkatkan PAD sangat diperlukan jika pemerintah daerah mempunyai kemauan dalam hal ini misalkan peningkatan di sektor pariwisata.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Tabel 5. Tingkat keserasian penerimaan PAD belanja operasional tahun anggaran 2017-2021

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2017	1.481.520.782.617,22	1.846.458.264.255,22	80
2018	1.521.442.608.529,88	1.906.017.589.489,88	79
2019	1.609.749.628.450,68	1.917.895.032.426,68	83
2020	1.572.625.425.629,00	1.820.342.899.284,00	86
2021	26.075.152.662,00	718.312.446.222	3,6
Rata- rata			66

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Tabel 6. Tingkat keserasian penerimaan PAD belanja modal tahun anggaran 2017-2021

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2017	364.937.481.638,00	1.846.458.264.255,22	19
2018	384.574.980.960,00	1.906.017.589.489,88	20
2019	308.145.403.976,00	1.917.895.032.426,68	16
2020	157.126.719.574,00	1.820.342.899.284,00	8,6
2021	850.173.800	718.312.446.222	0,11
Rata- rata			12

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Rasio Keserasian dibagi menjadi Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Klaten dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Dimulai dari tahun 2017 menjadi 80,2%, dan pada tahun 2018 turun menjadi 79,8%. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 119,8% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,9%. Kembali terjadi penurunan ditahun 2021 menjadi 3,6%. Penurunan rasio belanja operasi di kabupaten Klaten tidak terlalu signifikan. Rasio Belanja Modal di kabupaten klaten cenderung mengalami penurunan. Dimulai dari tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 19,7%, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 20,1%. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 16,06% dan di tahun

2020 mengalami penurunan menjadi 0,86%. Kembali mengalami penurunan ditahun 2021 menjadi 0,11%.

Dari hasil uraian diatas, dapat diketahui bahwa rasio belanja operasi masih lebih besar jika dibandingkan dengan rasio belanja modal. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten masih cenderung mementingkan pengeluaran pemerintahan dari pada pengeluaran pembangunan di daerah. Ini dapat terjadi karena pemerintah belum mampu melakukan apa yang menjadi patokan dalam belanja modal sehingga pemerintah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan pemenuhan dalam belanja modal masih belum terpenuhi. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat karena pada dasarnya anggaran daerah adalah dana publik yang harus digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Tabel 7. Tingkat pertumbuhan penerimaan PAD tahun anggaran 2017-2021

Keterangan	Tahun						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PAD	224.197	371.718	395.884	311.648	329.963	160.129	
Pertumbuhan PAD	0	65%	6,5%	-21%	5,8%	-51%	1,08%
Pendapatan	2.258.604	2.581.515	2.577.961	2.689.353	2.578.135	2.306.874	
Pertumbuhan Pendapatan	0	0,15%	-0,13%	4,3%	-4,1%	-10%	-2,06%
Belanja Operasional	1.563.576	1.481.520	1.521.442	1.609.749	1.572.625	26.075	
Pertumbuhan Belanja Operasional	0	-5,2%	2,6%	5,8%	-2,3%	-98%	-19,4%
Belanja Modal	220.759	364.937	384.574	308.145	157.126	850	
Pertumbuhan Modal	0	65%	5,3%	-19,8%	-49%	-99%	-19,5%

Sumber: Data Olahan Kabupaten klaten

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 1,08%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 65% namun terus mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 6,5% dan tahun 2019 sebesar -21%. Tahun 2020 mengalami kenaikan 5,8% namun di tahun 2021 turun kembali sebesar -51%. Diharapkan Kabupaten Klaten selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.

Jika dilihat dari perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,06% dari Tahun 2017 tumbuh 0,15%. Tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak signifikan sebesar -0,13%,

Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,3% dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi -4,1%. Di tahun 2021 kembali turun menjadi -10%.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2017 terjadi penurunan -5,2% dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 2,6%. Tahun 2019 naik kembali sebesar 5,8% dan mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar -2,3% dan pada Tahun 2021 menjadi -98%. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar -19,4%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan dan cenderung fluktuatif. Di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 65%. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,3%. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar -19,8% dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi -49%. Dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -99%. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar -19,5%.

Pada Pendekatan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan belanja Modal termasuk dalam kategori belum baik. Karena masih mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Jika pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut mengutamakan belanja modal di daerahnya.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas serta efisiensi anggaran belanja daerah di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017-2021 sangat efektif dan efisien dari tahun ke tahun. Untuk tingkat kemandirian daerah Kabupaten Klaten termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Kemudian untuk tingkat keserasian keuangan daerah Kabupaten Klaten masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan anggaran daerah Kabupaten Klaten masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan dan cenderung fluktuatif.

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu saran yang diajukan peneliti, yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Klaten harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan asset-aset daerah yang potensial. Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio yang bisa menggambarkan keadaan

keuangan yang sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amanda. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- [2] Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak*, 32, 1–18.
- [3] Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- [4] Dwi Destri Arnianto, A. S. (2020). PENGARUH LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENGIKUT KINERJAKEUANGANPEMERINTAHDAERAH KOTA PADANG. *Pareso Jurnal*, Vol. 2, No, 36–49.
- [5] Dwirandra, A. A. N. . (2006). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002 - 2006 a.a.n.b. dwirandra. *Jurnal Akuntansi*, 22, 1–21.
- [6] Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- [7] Halim, A. (2013). *Keuangan Daerah. Edisi Keempat* (Salemba Empat (ed.)).
- [8] Hersa, A. K. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Peran Internal Audit, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Rumah Sakit di K. *Repository IIB Darmajaya*.
- [9] Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan* (Bumi Aksara (ed.)).
- [10] Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama.
- [11] Majampoh, W. T. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1731–1741.
- [12] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi (ed.)).
- [13] Nurhaliza, F. (2022). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18643>
- [14] Putri, A. R., & Kabib, N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015. *Prosiding Seminar Nasional & Call for ...*, September, 149–157.
- [15] Putri, M. V., Gamayuni, R. R., Komaruddin, K., & Dharma, F. (2021). Analisis Pendapatan Berbasis Kas Dan Berbasis AkruaL Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 75–86. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i2.263>
- [16] Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>

- [17] Siregar, D. A. O., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE /*, 9(1), 1–19.
- [18] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Alfabeta (ed.)).
- [19] Suryanto, S. (2019). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 7(2), 188–200.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2584>
- [20] Walandouw, S., Tinangon, J., & Dien, A. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 534–541.